

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara terbesar. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, hasil pungutan pajak di Negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan Negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah dan segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakannya. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan.

Peningkatan pelayanan perpajakan terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha memenuhi aspirasi Wajib Pajak (WP) contohnya seperti dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pembaharuan sistem perpajakan yang dilakukan DJP adalah bagian dari reformasi perpajakan. Salah satunya modernisasi perpajakan yaitu dengan penerapan media elektronik *e-system*.

Sedangkan menurut Dirjen Pajak, perbaikan sistem administrasi ini diharapkan mampu mengurangi kasus penyelewengan, karena tidak ada lagi pajak yang dinilai secara manual, dalam sistem ini juga memperbaiki beberapa kelemahan kinerja administrasi perpajakan modern seperti pendaftaran wajib pajak, pengolahan surat pemberitahuan tahunan, akun pembayaran pajak, manajemen dokumen dan sistem informasi arsitektur pajak dan pembenahan sistem administrasi merupakan hal yang paling mungkin dilakukan agar kasus penyelewengan pajak berkurang.

Dari reformasi tersebut timbulah sistem administrasi perpajakan modern yaitu seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini yang mengikuti perkembangan jaman. Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi. Fasilitas tersebut diantara lain *website, Call Centre, Complaint Centre, e-filling, e-spt, one-Line Payment*. (Direktorat Jenderal Pajak).

Adapun data yang terdapat di KPP Pratama Kota Sukabumi, tentang yang melapor secara manual dan elektronik

Tabel 1.1p
WP Orang Pribadi lapor Manual & Elektronik
Dari tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Orang Pribadi Manual	48,249	57,336	96,689	46,111	31,824
Orang Pribadi Elektronik	-	-	-	13,284	17,857

Sumber : KPP Pratama Kota Sukabumi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak pada tahun 2017 yang melaporan secara manual lebih besar dengan jumlah 46.111 sedangkan yang melakukan laporan secara elektronik berjumlah 13.284 dan pada tahun 2018 yang melapor secara manual berjumlah 31.824 dan yang melapor secara elektronik berjumlah 17.857. pada tahun 2018 jumlah pengguna yang lapor secara elektronik mengalami kenaikan sebesar 4.573 atau bertambah sebesar 34,42%. Dalam sdtiap tahunnya baik yang melapor secara manual dan elektronik mengalami peningkatan, dan Wajib Pajak yang lapor secara manual lebih banyak dari yang melapor secara elektronik. Pelaporan elektronik baru terjadi pada tahun 2017.

Adapun data tabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak karyawan yang dilihat dari pelaporan SPT yang terdaftar di KPP Pratama Kota Sukabumi

Tabel 1.2
Tingkat kepatuhan WP OP karyawan dilihat dari pelaporan SPT
Dari tahun 2012-2018

Tahun	WP OP karyawan yang terdaftar	WP OP karyawan yang wajib melapor SPT	Realisasi	Persentase
2014	136,903	87,807	46,269	52,70%
2015	167,190	103,149	55,073	53,34%
2016	202,650	135,799	93,926	69,17%
2017	226,057	118,831	54,457	45,82%
2018	245,989	155,233	46,187	29,75%

Sumber : KPP Pratama Kota Sukabumi

Dari data tabel di atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi dilihat dari pelaporan SPT, adanya ketidaksesuaian jumlah yang seharusnya WPOP karyawan yang wajib SPT dengan realisasi SPT. Jadi, tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Kota Sukabumi dalam pelaporan SPT masih rendah. Dalam setiap tahunnya memang mengalami peningkatan, namun dengan jumlah realisasi yang tidak sesuai dengan jumlah daftar yang seharusnya wajib lapor SPT.

Adapun tingkat kepatuhan WPOP Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi dari tahun 2012-2018

Tabel 1.3
Tingkat kepatuhan WP OP Non karyawan dilihat dari pelaporan SPT
Dari tahun 2012-2018

Tahun	WP OP non karyawan yang terdaftar	WP OP non karyawan yang wajib melapor SPT	Realisasi	Persentase
2014	51,656	32,418	1,980	6,11%
2015	53,939	20,114	2,263	11,26%
2016	56,382	18,496	2,763	14,94%
2017	63,021	17,324	4,938	28,50%
2018	68,000	11,764	3,494	29,70%

Sumber : KPP Pratama Kota Sukabumi

Dari data tabel di atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi dilihat dari pelaporan SPT, setiap tahunnya memang mengalami peningkatan, namun adanya ketidaksesuaian jumlah yang seharusnya WPOP Non karyawan yang wajib SPT dengan realisasi SPT. Jadi, adanya tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Kota Sukabumi dalam pelaporan SPT masih rendah. Dan jika dibandingkan antara WPOP karyawan dengan Non karyawan dalam pelaporan SPT-nya lebih banyak jumlah yang WPOP karyawan.

Data diatas merupakan tingkat kepatuhan WPOP karyawan maupun Non karyawan dalam pelaporan SPT, karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dinilai dari bagaimana Wajib Pajak tersebut melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan Wajib Pajak melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri (*e-registration*), kepatuhan untuk menyetorkan

kembali Surat Pemberitahuan (SPT) (*e-SPT*), kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (*e-billing*). (Rahayu, 2017:150).

Menurut penelitian terdahulu, oleh Evalin Yuanita Tologana Meily Kalalo dalam jurnal Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado) pada tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis regresi linear sederhana bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis koefisien korelasi menghasilkan nilai koefisien korelasi 0,324.

Menurut penelitian Endang Siti Astuti dalam jurnal Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari) pada tahun 2015, hasil dari Uji F atau simultan dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian ini adalah dapat diterima. Karena dalam pengujian F-test diperoleh hasil dengan nilai yang signifikan secara simultan. Dari hasil uji t atau parsial dapat diketahui pengaruh secara individu variabel bebas (Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration* (X1), Penerapan Sistem Administrasi *e-SPT* (X2), dan Penerapan Sistem Administrasi *e-Filing* (X3) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa terdapat tiga variabel yang

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration*, Penerapan Sistem Administrasi *e-SPT*, dan Penerapan Sistem Administrasi *e-Filing*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan jurnal Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Surakarta pada tahun 2014, Variabel struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a dan Variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a .

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, dan juga jika dilihat dari data yang peneliti dapatkan di KPP Pratama Sukabumi peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi masih rendah yang dilihat dari pelaporan SPT-nya. Maka peneliti melakukan sebuah penelitian dengan ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi dengan judul penelitian **“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
2. Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pengelola pajak masih rendah
3. Masih banyak wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual
4. Masih adanya wajib pajak yang tidak mengerti dan kesulitan dalam pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan
5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah harus didasarkan pada masalah (Sugiyono,2017:35). Terdapat rumusan masalah yang dicakup oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kota Sukabumi?
2. Seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kota Sukabumi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kota Sukabumi
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kota Sukabumi

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang mencakup dalam penelitian ini, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mendapatkan gambaran umum Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
- b. Penelitian disini dimaksud untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menyerap ilmu yang diperoleh.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis
Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan ilmu baru bagi peneliti terutama dalam Perpajakan dalam sudut pandang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana membayar pajak dengan praktis secara online.
- c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama yaitu Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

d. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan untuk KPP Pratama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memungut pajak khususnya di Kota Sukabumi.